

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh laba, yang nantinya digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya (**Wahyuningsih dan Suryanawa, 2012**). Sebuah perusahaan tentu akan menghindari kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan *Financial Distress* bahkan kebangkrutan. *Financial distress* terjadi sebelum kebangkrutan pada suatu perusahaan. Menurut **Hatianah (2017)** *Financial Distress* dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari internal ataupun eksternal perusahaan. Faktor internal yang mempengaruhi *Financial Distress* adalah kesulitan arus kas, besarnya jumlah hutang perusahaan, tata kelola perusahaan yang buruk dan kerugian yang dialami perusahaan dalam kegiatan operasional selama beberapa tahun. Faktor eksternal yang mempengaruhi *Financial Distress* lebih bersifat makroekonomi dan memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung, seperti kenaikan indeks harga saham gabungan, inflasi dan nilai tukar.

Menurut **Yudhi Herliansyah (2012)** sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Potensi yang kaya akan sumber daya alam akan dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksplorasi pertambangan sumber daya tersebut. Perusahaan dalam industri pertambangan

umum dapat berbentuk usaha terpadu dalam arti bahwa perusahaan tersebut memiliki usaha eksplorasi, pengembangan dari konstruksi, produksi dan pengelolaan sebagai satu kesatuan usaha atau berbentuk usaha-usaha terpisah yang masing-masing berdiri sendiri.

Model peringatan dini (*early warning system*) untuk mengantisipasi adanya *financial distress* perlu terus dikembangkan, karena model ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi terjadinya kesulitan keuangan sejak awal bahkan untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Dengan mengetahui kondisi *financial distress* diharapkan perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan sedini mungkin. *Financial distress* didapat dengan cara menganalisis laporan keuangan.

Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk memproyeksi tentang berbagai aspek *financial* perusahaan dimasa mendatang. *Financial distress* diukur dengan menggunakan *Earning Per Share* (EPS), karena EPS dapat menggambarkan seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan keuntungan per lembar saham yang akan dibagikan kepada pemilik saham. Kebangkrutan perusahaan akan mengakibatkan berbagai kerugian baik bagi pemegang saham, karyawan dan perekonomian nasional (Al-Khatib dan Al-Horani, 2012).

Menurut Plat dan Plat (2014) mendefenisikan *Financial Distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditas. *Financial Distress* dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori

solvabilitas. Permasalahan terjadinya *insolvency* bisa timbul karena faktor berawal dari kesulitan likuiditas.

Menurut **Abdilah (2017)** dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar sebagaimana yang tercantum pada UU PT NO.40 tahun 2007.

World Bank (2016) mendefenisikan *Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Komisaris independen merupakan pihak yang dapat berperan sebagai pengawas manajemen dalam melaksanakan mekanisme corporate governance. Selain adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris, pengawasan juga dilakukan oleh pihak eksternal yang independen agar keputusan yang diambil tepat dan menjauhkan perusahaan dari kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* (**Muharam dan Triwahyuningtyas, 2012**). Berikut ini disajikan tabel perusahaan Tambang yang mengalami kondisi *financial distress* antara periode 2015-2018.

Terjadinya *Financial Distress* banyak dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Menurut **Miglani, et al (2015)** menyatakan bahwa terdapat serangkaian praktik kecurangan dalam perusahaan yang terjadi di beberapa perusahaan besar di Australia. Praktik kecurangan yang dilakukan beberapa perusahaan di Australia

seperti *HIH Insurance Company* dan *One tel and Harris Scarfe* menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut. Sebagai akibat dari peristiwa bangkrutnya perusahaan tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pemegang saham dan lebih lanjut menjadikan menurunnya kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan ([Wikipedia](#)).

Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termasuk direktur utama adalah setara. Tugas direktur utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasi kegiatan direksi. (Taco dan Ilat, 2016) berpendapat bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Banyaknya jumlah Dewan Direksi dapat mempengaruhi kondisi keuangan karena setiap hasil keputusan yang dijalankan perusahaan berasal dari hasil keputusan Dewan Direksi.

Selain dewan direksi, *corporate governance* juga dapat memicu terjadinya *financial distress*. Penelitian yang dilakukan oleh Savera Helena dan Muhammad Saifi (2018) menyatakan bahwa bahwa Ukuran Dewan Direksi dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Financial Distress*. Namun, Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap *Financial Distress*. Istilah *Corporate Governance* dalam dunia bisnis menjadi sangat populer, salah satu pemicunya adalah krisis ekonomi. Terjadinya krisis ekonomi menyadarkan semua pihak

tentang dampak praktek *corporate governance* terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat membantu perusahaan agar dapat memperbaiki kondisi perusahaan akibat krisis ekonomi. Namun saat ini, pelaku-pelaku usaha seperti regulator, investor, pemberi pinjaman, dan stakeholders kian menyadari pentingnya implementasi *corporate governance* dalam perusahaan akibat meningkatnya kondisi persaingan dan globalisasi. Sebaliknya, *corporate governance* yang buruk dapat mendorong turunnya tingkat kepercayaan investor.

Porter (2013) menjelaskan secara umum, perusahaan akan lebih produktif jika perusahaan dalam keadaan stabil, baik dari segi keuangannya, personel, maupun iklim politik dari negara tempat perusahaan tinggal. Alasan mengapa perusahaan sukses atau gagal disebabkan oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Artinya kesuksesan perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategi dan manajerial perusahaan tersebut, diantaranya mencakup strategi penerapan sistem *corporate governance*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh **M.Triwahyuningtias (2012)** menyatakan bahwa struktur kepemilikan, ukuran dewan direksi, likuiditas dan *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan perusahaan mengalami *Financial Distress*. Bukti dari pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran dewan direksi juga dibuktikan oleh pengujian lag 1 tahun. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran dewan komisaris dan komisaris independen dengan kemungkinan perusahaan mengalami kondisi *Financial Distress*.

Komisaris independen (*independent commissioner*) berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang (*controveiling power*), maksud pernyataan tersebut adalah dengan adanya komisaris independen, selain adanya pengawasan pengambilan keputusan manajemen oleh dewan komisaris, pengawasan juga dilakukan oleh pihak eksternal yang independen agar keputusan yang diambil tepat dan menjauhkan perusahaan dari kemungkinan mengalami kesulitan keuangan. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh ukuran dewan direksi, *corporate governance* dan komisaris independen terhadap terjadinya kondisi *financial distress*”**”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Dewan direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan dengan pembagian tugas dan wewenangnya.
2. Banyaknya jumlah Dewan Direksi dapat mempengaruhi kondisi keuangan karena setiap hasil keputusan yang dijalankan perusahaan berasal dari hasil keputusan Dewan Direksi.
3. Kesuksesan perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategi dan manajerial perusahaan tersebut, diantaranya mencakup strategi penerapan sistem *corporate governance*.
4. Komisaris independen (*independent commissioner*) berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dan pengawasan pengambilan keputusan manajemen oleh dewan komisaris guna menjauhkan perusahaan dari kemungkinan mengalami kesulitan keuangan.
5. Masih adanya kecurangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis memberikan batasan penelitian agar tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah sarannya, maka peneliti membatasi objek penelitian pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018, dengan variabel ukuran dewan direksi, *Corporate Governance* dan komisaris independen sebagai variabel independen, dan *Financial Distress* sebagai variabel dependen. Periode tahun 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap terjadinya kondisi *Financial Distress* pada perusahaan Tambang di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
2. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance* terhadap terjadinya kondisi *Financial Distress* pada perusahaan Tambang di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
3. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap terjadinya kondisi *Financial Distress* pada perusahaan Tambang di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
4. Bagaimana pengaruh Ukuran dewan direksi, *Corporate Governance* dan komisaris independen secara bersama-sama terhadap terjadinya kondisi *Financial Distress* pada perusahaan Tambang di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap terjadinya kondisi *Financial Distress* pada perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 -2018.
2. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimana pengaruh *Corporate Governance* terhadap terjadinya kondisi *Financial Distress* pada perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.
3. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap terjadinya kondisi *Financial Distress* pada perusahaan Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018.
4. Untuk mengetahui dan mengestimasi bagaimana pengaruh Ukuran dewan direksi, *Corporate Governance* dan komisaris independen terhadap terjadinya kondisi *Financial Distress* pada perusahaan Tambang di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

1.5.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kondisi *financial distress* perusahaan serta untuk membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang tepat.

b. Bagi akademis

Sebagai tambahan wawasan, rujukan dan referensi bagi masyarakat umum dalam menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi, *Corporate Governance* dan komisaris independen terhadap *Financial Distress*. Bagi Pengembangan Praktek Manajemen, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas standar.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang telah penulis peroleh selama kuliah diperkuliahan Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen di Universitas Putra Indonesia “YPTK” PADANG.